

TRANS KOETARADJA RAMAH DIFABEL DENGAN GERAKAN SYEDARA DIFABEL

Mohd Febrianto

Analisis Kebijakan Puslatbang KHAN, LAN RI

ABSTRAK

Sejak dioperasikan Trans Koetaradja pada Tahun 2016, moda transportasi publik ini menjadi kebutuhan terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Namun, di antara pengguna Trans Koetaradja terdapat penyandang disabilitas yang merupakan salah satu kelompok rentan selain wanita, orang tua, dan anak-anak. Kemanfaatan transportasi publik ini belum begitu dirasakan oleh para penyandang disabilitas. Masih sangat jarang dijumpai penyandang disabilitas yang menunggu kedatangan Trans Koetaradja layaknya para pengguna umum lainnya. Beberapa faktor yang membuat kaum difabel enggan menggunakan Trans Koetaradja adalah fasilitas yang mendukung kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, stigma, dan Belum ada perlakuan dan pemenuhan sarana serta prasarana yang sesuai dengan ragam penyandang disabilitas. Oleh karenanya, dirasa sangat penting untuk dibentuk gerakan Syedara Difabel melalui beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk mendukung pelayanan Trans Koetaradja yang lebih inklusif..

Kata kunci: *Trans Koetaradja, Disabilitas, Aksesabilitas*

PENDAHULUAN

Sebagai penyandang status ibu kota provinsi, kota Banda Aceh mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh BPS kota Banda Aceh, pertumbuhan penduduk kota Banda Aceh meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir sebagaimana digambarkan dalam grafik.

Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga memicu kebutuhan transportasi yang menjadi sarana mobilitas antar ruang dalam kota Banda Aceh.

Dulu, terdapat moda transportasi publik yang dikenal dengan nama “Labi-Labi” dan “Damri” yang sangat membantu mobilitas masyarakat antar kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Namun seiring waktu, moda transportasi publik itu pun tergerus, hingga akhirnya pada Tahun 2016 Pemerintah Aceh mengoperasikan Trans Koetaradja sebagai jawaban terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat. Kemanfaatan moda transportasi publik ini sangat dirasakan dan menjadikannya idaman bagi masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

Diantara pengguna, tentu terdapat kelompok rentan yang senantiasa memanfaatkan keberadaan Trans Koetaradja. Salah satu yang termasuk dalam kategori kelompok rentan selain orang tua, anak-anak, dan wanita adalah penyandang disabilitas (UU 25/2009 Pelayanan Publik).



DESKRIPSI MASALAH

1. Fasilitas transportasi Trans Koetaradja belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana observasi yang dilakukan oleh Zula Nadhifa, Irin Caesarina, dan Putra Rizkiya di Tahun 2023, masih banyak halte Trans Koetaradja yang masih belum sesuai terhadap pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Tabel 1. Penilaian Halte Berdasarkan Observasi

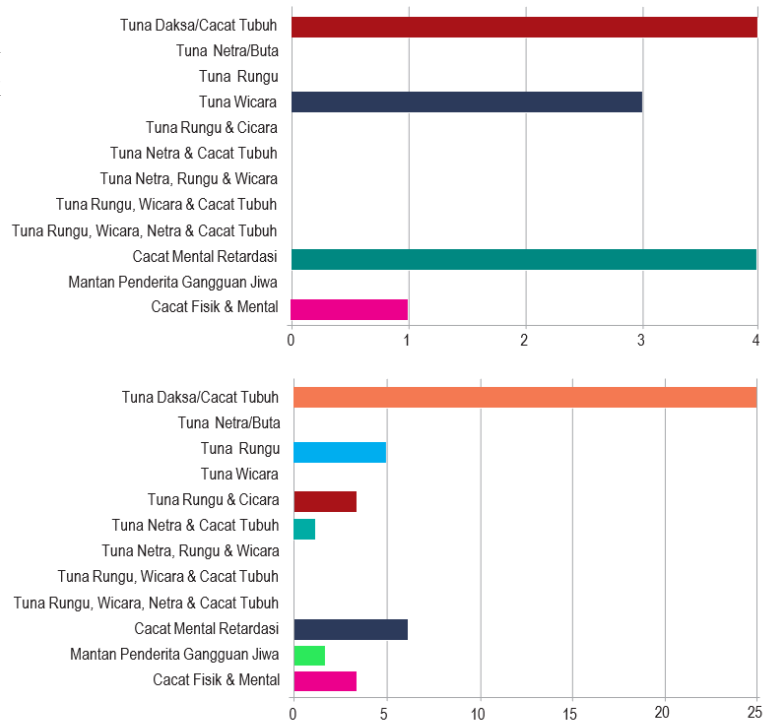
No	Nama Halte	Klasifikasi Kesesuaian	Nilai Skor
1	Halte Peunayang	Tidak Sesuai	1
2	Halte Keudah	Tidak Sesuai	1
3	Halte MRB	Sesuai	3
4	Halte Pasar Aceh	Kurang Sesuai	2
5	Halte Barata	Kurang Sesuai	2
6	Halte Museum Aceh	Tidak Sesuai	1
7	Halte Blang Padang	Tidak Sesuai	1
8	Halte Kerkhoff	Tidak Sesuai	1
9	Halte Gunongan	Tidak Sesuai	1
10	Halte Museum Tsunami	Kurang Sesuai	1
Total			15

Tabel diatas menggambarkan bahwa, dari 10 (sepuluh) lokasi halte Trans Koetaradja, hanya Halte MRB (Masjid Raya Baiturrahman) yang “sesuai” terkait pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sedangkan Halte Pasar Aceh, Barata, dan Museum Tsunami berpredikat “Kurang Sesuai”, dan enam halte lainnya masih tergolong “Tidak Sesuai”.

2. **Stigma.** Ketertarikan atau minat pemanfaatan Trans Koetaradja oleh penyandang disabilitas dirasa masih sangat minim. Salah satu faktornya adalah penyandang disabilitas mengalami stigma dan perlakuan khusus yang tidak memuaskan, yang dapat berpengaruh buruk di berbagai aspek kehidupan.

Menurut KBBI, stigma diartikan sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Istilah *ableisme* pun masih sering melekat di kalangan masyarakat. *Ableisme* mengacu pada sikap diskriminasi, bias, dan prasangka keliru terhadap penyandang disabilitas, yang dapat berakar dari penyimpangan berpikir bahwa penyandang disabilitas lebih rendah dibandingkan orang lain. *Ableisme* dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk perilaku agresif secara terbuka, seperti intimidasi, pelecehan, dan kekerasan, serta prasangka yang menurunkan potensi penyandang disabilitas. Jadi wajar jika kaum difabel merasa “minder” untuk menggunakan fasilitas atau sarana publik jika mereka tidak merasa disetarakan atau tidak diperlakukan khusus sebagaimana amanat undang-undang pelayanan publik.

3. Belum adanya survei pengguna Trans Koetaradja oleh Penyandang Disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari sigapaceh.id, ragam penyandang disabilitas yang terdapat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar adalah sebagai berikut:



Grafik tersebut menunjukkan bahwa ragam penyandang disabilitas di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar didominasi oleh tuna daksa/cacat tubuh.

Namun demikian, terdapat juga ragam penyandang disabilitas lainnya yang juga perlu dipertimbangkan. Pemenuhan sarana dan prasarana Trans Koetaradja sejauh ini belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan ragam penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana Trans Koetaradja seperti kursi roda, jalan landai, ramp, dan lain-lain dirasa masih belum mengakomodir kebutuhan ragam penyandang disabilitas. Hal ini dapat disebabkan oleh data pengguna Trans Koetaradja yang mencakup kaum difabel masih belum diperoleh oleh Dinas Perhubungan Aceh atau Dinas lainnya yang terkait, karena hingga saat ini belum ada publikasi dari pihak manapun terkait survei penggunaan Trans Koetaradja oleh penyandang disabilitas.

KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Tahun 2024–2029.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sebagai upaya menjadikan Trans Koetaradja yang inklusif dan ramah difabel, maka perlu dibentuk sebuah gerakan strategis yang dapat menciptakan suasana dan fasilitas yang kondusif dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Gerakan tersebut dapat diberi nama Syedara Difabel, yang dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas merupakan

bagian dari kita dan perlu mendapatkan perlakuan yang sama. Langkah-langkah tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:.

Pertama, Dinas Perhubungan Aceh mempromosikan penggunaan Trans Koetaradja kepada penyandang disabilitas dengan melakukan Airbrush Painting di Trans Koetaradja. Promosi ini dilakukan guna “merangkul” kaum difabel agar terlepas *stigma negative* dan rasa takut menggunakan Trans Koetaradja. Promosi dapat dilakukan dengan cara mengecat bodi bus Trans Koetaradja layaknya airbrush painting, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini untuk menggenjot pariwisata di Aceh. Pengecatan dapat dilakukan dengan menampilkan duta disabilitas aceh ataupun dengan kata-kata ajakan yang bersifat persuasif. Hal ini dapat dilakukan secara swakelola oleh Dinas Perhubungan Aceh, atau juga dapat disebarkan kepada masyarakat umum. Dengan adanya promosi “berjalan” seperti ini, maka dapat menghilangkan stigma negatif pada penyandang disabilitas meningkatkan minat mereka dalam menggunakan Trans Koetaradja.

Kedua, Dinas Perhubungan Aceh perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala fasilitas Trans Koetaradja. Selaku penanggungjawab Trans Koetaradja, perlu meningkatkan fasilitas Trans Koetaradja, seperti halte dan ketersediaan kursi roda dalam bus Trans Koetaradja. Beberapa halte yang masih belum sesuai dalam memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas harus mendapatkan standar fasilitas yang sama. Namun juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sarana dan prasarana yang ada saat ini dalam rangka mendukung pelayanan Trans Koetaradja yang inklusif.

Ketiga, Survei perilaku pengguna Trans Koetaradja terhadap penumpang Penyandang Disabilitas. Untuk mengakomodir pemenuhan akses yang merata bagi ragam penyandang disabilitas, maka Dinas Perhubungan Aceh harus melakukan survei terhadap pengguna Trans Koetaradja dari kalangan penyandang disabilitas. Survei tersebut sangat berguna dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ragam penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya.

Seperti ketersediaan papan informasi tentang daftar trayek dan rute jalur Trans Koetaradja yang dapat dibunyikan atau ditulis dengan huruf Braille. Papan informasi ini pasti akan sangat membantu para tuna netra.

Keempat, kampanye Peduli Disabilitas. Menanamkan nilai-nilai peduli kepada kelompok rentan sangat penting dalam pelayanan publik. Begitupun kepada penyandang disabilitas, perlu ada kepedulian dan keramahan yang dapat merangkul kaum difabel untuk selalu merasa nyaman saat menerima pelayanan. Perlu ditanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap penyandang disabilitas kepada para petugas Trans Koetaradja. Internalisasi nilai-nilai peduli tersebut harus dapat diwujudkan dalam bekerja. Perlu diusung sebuah nilai yang mampu menjadi *core value* terhadap kaum difabel, yaitu peduli dan responsif. Peduli yang berarti perhatian khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Sedangkan responsif yang mengartikan implikasi dari nilai peduli, yaitu sigap dan cepat tanggap dalam membantu penyandang disabilitas untuk dapat memanfaatkan moda transportasi Trans Koetaradja.